

**TREND, EKISTENSI, PERAN DAN FUNGSI MEDIA TELEVISI SWASTA NASIONAL
DALAM KONTEKS KESEJAHTERAAN SECARA EKONOMI DAN KEMANDIRIAN****Hanafi**

Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : hn.hanafi@unibi.ac.id**Abstrak**

Tulisan ini digunakan metode analisis framing, khususnya dari pendekatan isi, ideology dan ekonomi media yang tidak hanya menganalisis wacana literature tetapi juga memaparkan segi analisis dan interpretasi tulisan terkait keberadaan dan bisnis media swasta nasional di Indonesia. Hasil kajian memberikan penjelasan mengenai arti keberadaan media, kebebasan media memunculkan masalah pemusatan kepemilikan perusahaan media (konglomerasi), yang mengubah wajah kebebasan media dan kebutuhan informasi publik menjadi kebebasan menguasai pasar media. Dari sisi keterikatan ideologi, kiprah media televisi tidak lepas dari pemikiran dan kepentingan ideologis dari para awak medianya. Secara ekonomi, pers diakui sebagai lembaga ekonomi, walaupun tujuannya hanya sebatas untuk kesejahteraan karyawan (Pasal 3 Ayat 2 Undang-undang Pers tahun 1999). Isi Program Penayangan Televisi, lebih banyak menayangkan paket dan muatan yang di setting menurut kepentingan politik dan ekonomi pemilik media serta sesuai kerangka ideologis para awak medianya. Sementara itu dari sisi organisasi, media lebih terikat kepada struktur dan hierarki kekuasaan (yang dibangun untuk kepentingan otoritas pemilik media) itu sendiri. Selanjutnya dari sisi kulturalis, maka media telah masuk dalam era industri global, dan ada batasan struktural yang membuat tidak semua nilai idealis pers dapat diwujudkan.

Kata kunci: *Trend*, eksistensi, peran dan fungsi media televisi swasta nasional, konteks kesejarahan, ekonomi dan kemandirian

Abstract

This paper uses the framing analysis method, especially from the content approach, ideology and media economy which not only analyzes literary discourse but also describes the analytical and interpretative aspects of writing related to the existence and business of national private media in Indonesia. The results of the study provide an explanation of the meaning of media existence, media freedom raises the problem of the concentration of ownership of media companies (conglomerates), which changes the face of media freedom and the need for public information to become the freedom to control the media market. In terms of ideological attachment, the progress of television media cannot be separated from the ideological thoughts and interests of its media crews. Economically, the press is recognized as an economic institution, although its purpose is limited to the welfare of employees (Article 3 Paragraph 2 of the 1999 Press Law). The content of the Television Broadcasting Program, shows more packages and contents that are set according to the political and economic interests of the media owners and according to the ideological framework of the media crews. Meanwhile, from the organizational side, the media is more tied to the structure and hierarchy of power (which is built for the interests of the authority of the media owners) itself. Furthermore, from the culturalist side, the media has entered into the global industrial era, and there are structural boundaries that make not all the idealistic values of the press can be realized.

Keywords: Trend, existence, role and function of national private television media, historical context, economy and independence

1. PENDAHULUAN

Memasuki dua dasawarsa era reformasi di Indonesia, media massa sebagai salah satu pilar demokrasi, khususnya media Kominfo mengalami perkembangan yang sangat masif dan bervariasi. Dalam proses transisi menuju demokratisasi di Indonesia, sebagai salah satu wadah kemasyarakatan yang penting, media kominfo dalam era kebebasan pers saat ini bukanlah sekedar 'kebebasan dari' (*freedom from*) absolutisme, kekuasaan otoriter, sebagaimana era Orde Baru melalui pemberlakuan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, Deppen yang indoktrinatif seperti penentuan Pemred sebuah Harian melalui fit and proper test yang mengikat, dan seterusnya. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Saat ini media kominfo, khususnya media televisi memikul juga tanggung jawab sebagai wadah yang sewajarnya aktif merealisasikan prinsip *freedom for information*.

Ada krisis kepercayaan multidimensi yang salah satunya adalah krisis terhadap peran negara terhadap masyarakat sebagai pembela kepentingan rakyatnya. Ada teori bahwa negara kuat di alam demokrasi mempunyai peran dan fungsi menyejahterakan rakyatnya dengan memberdayakan sumber daya alam yang dimiliki melalui peran serta rakyat dan juga melalui lembaga-lembaga negara sebagai perangkat yang dimilikinya. Hal ini mengingatkan amanat konstitusi UUD 1945, yang jelas menegaskan kepada negara untuk menguatkan peran tersebut sehingga menimbulkan atau berbuah kesuksesan pengelolaan negara. Media massa menjadi salah satu wadah demokrasi yang memiliki peran dan fungsi untuk ikut serta dalam pengelolaan persoalan kenegaraan, khususnya orientasi dan upaya yang menyentuh kesejahteraan dan kemandirian seluruh bangsa. Pada realitasnya kemandirian ekonomi adalah suatu hal yang sulit dan hampir tidak mungkin dilakukan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Pasti bukan perkara mudah dan tentunya penuh tantangan, apalagi ini bersinggungan dengan kepentingan asing yang tidak secara serta merta mendukung upaya dalam hal ini. Di era keterbukaan saat ini, akan selalu ada infiltrasi dan intervensi kekuatan besar asing yang akan menghalang-halangi upaya bangsa Indonesia mewujudkan hal ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tidak dapat dipungkiri lagi, televisi yang sudah menjadi bagian hidup kita dan dunia penyiaran terkait pertelevisian di Indonesia semakin berkembang pesat. Banyaknya stasiun-stasiun penyiaran televisi membuat para pekerja industri pertelevisian ini harus bersaing dalam menyajikan sebuah tontonan yang menarik ditengah-tengah masyarakat. Tidak mengherankan televisi memiliki daya tarik yang luar biasa apabila sajian program dapat menyesuaikan dengan karakter televisi dan manusia yang mendapatkan terpaan media ini. Namun pada kenyataannya, yang terjadi adalah bahwa stasiun-stasiun televisi di Indonesia, terutama stasiun televisi swasta nasional, terjebak pada apa yang menjadi selera pasar. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang muncul bahwa tema acara yang disajikan di hampir semua saluran televisi ini tidak lagi beragam namun seragam. Beberapa format acara televisi yang sukses di satu stasiun televisi acapkali diikuti oleh televisi-televisi lainnya, hal ini terjadi hampir pada seluruh format acara televisi. Baik itu berita kriminal, tayangan misteri, infotainment, ajang pencarian bakat, music show dan lain-lain.

Maraknya komunitas televisi swasta membawa cukup banyak dampak dalam kehidupan bermasyarakat, erp angsa, dan bernegara baik positif atau negatif. Kehadiran merekapun sering menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pada satu sisi masyarakat dipuaskan oleh kehadiran mereka yang menayangkan hiburan dan memberikan informasi, namun di sisi lain mereka pun tidak jarang menuai kecemasan dari masyarakat karena tayangan-tayangan mereka yang kurang bisa diterima oleh masyarakat ataupun kelompok-kelompok individu tertentu. Semua stasiun berusaha untuk bisa menggaet pemirsa dengan program-program unggulannya. Dari segala macam keanekaragaman program siaran stasiun televisi, siaran berita menjadi salah satu primadona acara. Terlebih di era reformasi dengan segala keterbukaan di dalamnya ini, berita menjadi suatu kebutuhan penting dan pokok bagi khalayak. Beragam bentuk paket informasi diproduksi, dikemas dan disajikan sedemikian rupa sehingga menjadi salah satu program andalan. Hal ini merupakan upaya

media televisi dalam menjalankan tugasnya sebagai media massa. Selain itu juga merupakan suatu kiat menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif antara stasiun penyiaran yang ada. Hal ini tentu saja menjadi perhatian khusus bagi mereka yang berkecimpungan dalam media penyiaran ini untuk terus berupaya meningkatkan program siarannya.

Meskipun fungsi utama berita televisi adalah memberikan informasi, namun televisi juga dapat mengandung segi hiburan untuk pemuasan dan sebagai daya tarik agar pemirsa menyaksikannya. Sehingga yang terpenting bukan saja menyajikan acara yang menghibur, tetapi juga memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat. Gencarnya tayangan televisi beberapa tahun terakhir ini di Indonesia sarat dengan berbagai masalah dan problem sosial yang ditimbulkannya seperti, konsumtivisme, erotisme, sadisme, pencurian, pemerkosaan, perampokan, kerusuhan yang bersifat rasial, pemutusan hubungan kerja secara masal, demonstrasi dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat bersikap semakin ekstrim. Disinilah peran dan fungsi mulia televisi, yakni tugas untuk lebih menayangkan berita atau informasi yang lebih bersifat positif dan mendidik di masyarakat. Di tengah maraknya tampilan acara yang kurang mendidik, maka media televisi berusaha untuk menyajikan informasi atau acara yang mendidik dan berkualitas.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian dibagian pendahuluan, bahwa trend, eksistensi, peran dan fungsi media dalam konteks kesejahteraan secara ekonomi dan kemandirian selanjutnya akan dibahas dalam uraian pembahasan berikut.

Kebebasan media massa, khususnya televisi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment. Banyak jurnalis tidak ragu-ragu merasa bahwa secara ideal profesi mereka adalah memberikan informasi, agar warga negara mampu memainkan peran demokratiknya secara signifikan (Subiyakto & Rachmah, 2012: 114)

Terkait keberadaan media, kebebasan media memunculkan masalah pemusatan kepemilikan perusahaan media (konglomerasi), yang mengubah wajah kebebasan media dan kebutuhan informasi publik menjadi kebebasan menguasai pasar media. Padahal, konglomerasi media adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak bisa dihindarkan. Karena dengan penyatuan kepemilikan media, begitu pula integrasi redaksi (newsroom integration) di dalam kelompok media yang sama dapat menjadikan operasional industri media lebih efisien.

Ada beberapa ide pokok yang dianggap menjadi gagasan terpenting dan paling mendasar dalam kapitalisme dewasa ini. Pertama, diakuiinya hak milik perorangan secara luas, bahkan hampir tanpa batas. Kedua, diakui adanya motif ekonomi, mengejar keuntungan secara maksimal, pada semua individu. Ketiga, adanya kebebasan untuk berkompetisi antar individu, dalam rangka peningkatan status sosial ekonomi masing-masing. Keempat, adanya mekanisme pasar yang mengatur persaingan dan kebebasan tersebut (Rizki & Majidi, 2008: 216).

Kepemilikan berbagai macam perusahaan media massa, baik cetak, online, maupun elektronik, oleh satu konglomerat tertentu diyakini membatasi hak publik dalam memperoleh keberagaman informasi, pemberitaan, dan pandangan, yang sangat diperlukan dalam konteks berdemokrasi. Pemilik media yang terus-menerus mencari keuntungan akan berfokus pada profit semata, dan membatasi investasinya dalam menciptakan berita dan juga konten budaya yang diinginkan dan diperlukan dalam rangka edukasi, pembinaan, dan pendampingan kemandirian dalam rangka pemberdayaan social ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Baker menyatakan bahwa penyebab utama disfungsi media mencerminkan insentif pasar untuk fokus maksimal pada keuntungan, bukan pada kualitas dan media yang orang nilai. Konglomerasi media seperti pola-pola kepemilikan lainnya, menunjukkan perilaku disfungsi kolektif memaksimalkan keuntungan. Jadi, keragaman media, baik pemasok media maupun konten, dapat terancam dengan pemilik media yang mencari keuntungan dan bukannya mengutamakan kepentingan yang dibutuhkan masyarakat (Rianto, dkk, 2012: 13).

Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 menjamin bahwa pers di Indonesia tidak bisa dikenai penyensoran dan pembredelan. Tapi,

untuk media televisi dan radio, kebijakan pemerintah relatif tak banyak berubah. Izin untuk media siaran masih diperlukan karena media televisi, memakai frekuensi yang, selain jumlahnya sangat terbatas, termasuk ranah publik. Hubungan antara media massa penyiaran dengan massa tersebut diatur oleh hukum (Wiryawan, 2007: 66).

Dari sisi keterikatan ideologi, kiprah media televisi tidak lepas dari pemikiran dan kepentingan ideologis dari para awak medianya. Ideologi disini diartikan sebagai kerangka berfikir atau kerangka resensi tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Isi/program media televisi merupakan fungsi dari posisi ideologis dan mengatur *status quo: Hegemony approach*. Ideologi negara, sistem komunikasi internasional, aliran berita.

Secara ekonomi dan bisnis, pers diakui sebagai lembaga ekonomi, walaupun tujuannya hanya sebatas untuk kesejahteraan karyawan (Pasal 3 Ayat 2 Undang-undang Pers tahun 1999). Kebebasan pers di Indonesia pasca reformasi mempunyai beberapa implikasi, pada satu sisi media menjadi partisan, condong kepada salah satu kelompok sosial. Namun pada sisi yang lain muatan berita cenderung bombastis, berkisar pada masalah seks, kekerasan, kejahatan dan hiburan. Tujuannya adalah untuk menarik pangsa pasar yang luas, untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan cenderung mengarah menjadi industri padat modal, berteknologi tinggi dan profesionalisme manajemen, semua mengarah pada pers industri yang tidak berbeda dengan pers pasar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum peran dan fungsi media televisi swasta nasional sangat minim dalam menyajikan pemberitaan yang menyangkut tentang kepedulian sosial, pemberdayaan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Dalam isi / program-programnya, media televisi sangat kurang mengemas acara-acara yang mengandung misi pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta kemandirian masyarakat yang menjadi pemirsanya. Misalnya, tentang program kreatifitas, kepedulian masyarakat, pendampingan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pendampingan badan usaha kerakyatan (koperasi, badan perkreditan masyarakat) dan sebagainya. Penayangan seperti

ini merupakan fenomena yang berlaku pada hampir semua media televisi swasta nasional kita, yang seolah lupa bahwa media tersebut sebenarnya terkait juga dengan peran dan tanggungjawab sebagai lembaga pemberdayaan dan kesejahteraan social-ekonomi masyarakat.

Dengan menyimak trend keberadaan berbagai media televisi di Indonesia secara kontemporer, ternyata dinamika media televisi swasta nasional antara lain :

a. Penayangan Isi/ Program media televisi ditinjau berdasarkan: Pendekatan politik-ekonomi (*the political-economy approach*), Pendekatan organisasi (*organisational approach*), Pendekatan kulturalis (*culturalist approach*), lebih banyak menayangkan isi/program yang di setting menurut kepentingan politik dan ekonomi pemilik media serta kerangka ideologis para awak medianya. Sementara itu dari sisi organisasi, isi media lebih terikat kepada struktur dan hierarki kekuasaan yang ada dalam organisasi media itu sendiri. Selanjutnya dari sisi kulturalis (gabungan pendekatan politik-ekonomi dan pendekatan organisasi, maka media telah masuk dalam era industri global, dan ada batasan struktural yang membuat tidak semua nilai idealis pers dapat diwujudkan.

Sebagai salah satu focus pengamatan, ternyata dalam penayangan program-programnya, media televisi nasional lebih banyak mengaktualisasikan diri sebagai media yang memiliki keterikatan secara organisasi kepada ideologi politik, organisasi dan kepemilikan media, daripada kepada pelaksanaan tanggungjawab sebagai media massa yang bertanggungjawab pada komitmen profesionalisme jurnalistik, komitmen yuridis, dan kode etik keberadaannya sebagai lembaga social.

Jika dikaitkan dengan peran dan fungsi media sebagai salah satu alat demokrasi yang ikut menjalankan misi sebagai kekuatan kemandirian masyarakat luas seperti di amanatkan peraturan perundangan, yakni Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 dan Undang-undang 32 tahun 2002. Semestinya media televisi lebih memberikan program-program bernuansa informasi dan edukasi untuk membangkitkan kemandirian masyarakat luas dibidang ekonomi dan kemandirian sosial. Hal ini mengingat bahwa Media massa itu sendiri juga memiliki keterkaitan yang erat dengan

masyarakat. Media televisi adalah alat control social yang bahkan dalam sistem sosial, media massa menjadi salah satu institusi yang memiliki potensi dan efek sangat besar dalam kehidupan sebuah masyarakat. Media sebagai sumber kekuatan perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial politik masyarakat bangsa. Sebaliknya, media massa juga memiliki ketergantungan terhadap kehidupan politik (Arifin, 1992: 17).

5. KESIMPULAN

Terkait keberadaan media, kebebasan media memunculkan masalah pemusatan kepemilikan perusahaan media (konglomerasi), yang mengubah wajah kebebasan media dan kebutuhan informasi publik menjadi kebebasan menguasai pasar media. Dari sisi keterikatan ideologi, kiprah media televisi tidak lepas dari pemikiran dan kepentingan ideologis dari para awak medianya. Secara ekonomi, pers diakui sebagai lembaga ekonomi, walaupun tujuannya hanya sebatas untuk kesejahteraan karyawan (Pasal 3 Ayat 2 Undang-undang Pers tahun 1999).

Kebebasan pers di Indonesia, khususnya media televisi swasta nasional pasca reformasi mempunyai beberapa implikasi, pada satu sisi media menjadi partisan, condong kepada salah satu kelompok sosial. Namun pada sisi yang lain muatan berita cenderung bombastis, berkisar pada masalah seks, kekerasan, kejahatan dan hiburan. Tujuannya adalah untuk menarik pangsa pasar yang luas, untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan cenderung mengarah menjadi industri padat modal, berteknologi tinggi dan profesionalisme manajemen, semua mengarah pada pers industri yang tidak berbeda dengan pers pasar.

Pengamatan secara umum terhadap trend eksistensi, peran dan fungsi media televisi sangat minim dalam menyajikan pemberitaan yang menyangkut tentang kepedulian sosial, pemberdayaan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Isi/ Program Penayangan Televisi, lebih banyak menayangkan paket dan muatan yang di setting menurut kepentingan politik dan ekonomi pemilik media serta sesuai kerangka ideologis para awak medianya. Sementara itu dari sisi organisasi, media lebih terikat kepada struktur dan hierarki kekuasaan (yang dibangun untuk kepentingan otoritas pemilik media) itu sendiri. Selanjutnya dari sisi kulturalis, maka

media telah masuk dalam era industri global, dan ada batasan struktural yang membuat tidak semua nilai idealis pers dapat diwujudkan.

Jika dikaitkan dengan peran dan fungsi media sebagai salah satu alat demokrasi yang ikut menjalankan misi sebagai kekuatan kemandirian masyarakat luas seperti di amanatkan peraturan perundangan, yakni Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 dan Undang-undang 32 tahun 2002. Semestinya media televisi lebih manampilkan program-program untuk membangkitkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat luas dibidang ekomoni dan social

6. REFERENSI

- Albarran, A. B. 2002. *Media Economics: Understanding markets, industries and concepts*. Ames : Iowa State University Press.
- Bari, Habib. 1995. *Teknik dan Komunikasi Penyiar Televisi, Radio, MC*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darwanto. 2007. *Televisi Sebagai Media Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Effendi, Onong U. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2007. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara
- Jauhari, H. 2013. *Jurnalisme Televisi Indonesia*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Komunikasi Massa : Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*. Bandung : Widya Padjadjaran
- Mulyana, Deddy. 2012. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Wahyuni, H. I. 2000. *Televisi dan Intervensi Negara : Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi Pada Era Orde Baru*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wibowo, F. 2007. *Teknik Produksi Program Televisi*. Yogyakarta: Pinus BookPublisher.

Sumber-Sumber Lainnya :

- Handout Prof. Dr. Atie Rachmiate. *Dinamika Media dan Masyarakat*
- Handout Dr. Kiki Zakiah, M. Si. *Materi Media dan Jurnalistik Islam*.

